



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terbentuk dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menetapkan kriteria besaran Perangkat Daerah masing-masing Pemerintah Daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD sebagai upaya untuk menata organisasi Pemerintah yang efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas, agar keberadaan Perangkat Daerah efektif dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diubah dengan Peraturan Gubenur Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Prov.Kaltim.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas *melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.*



2. Fungsi

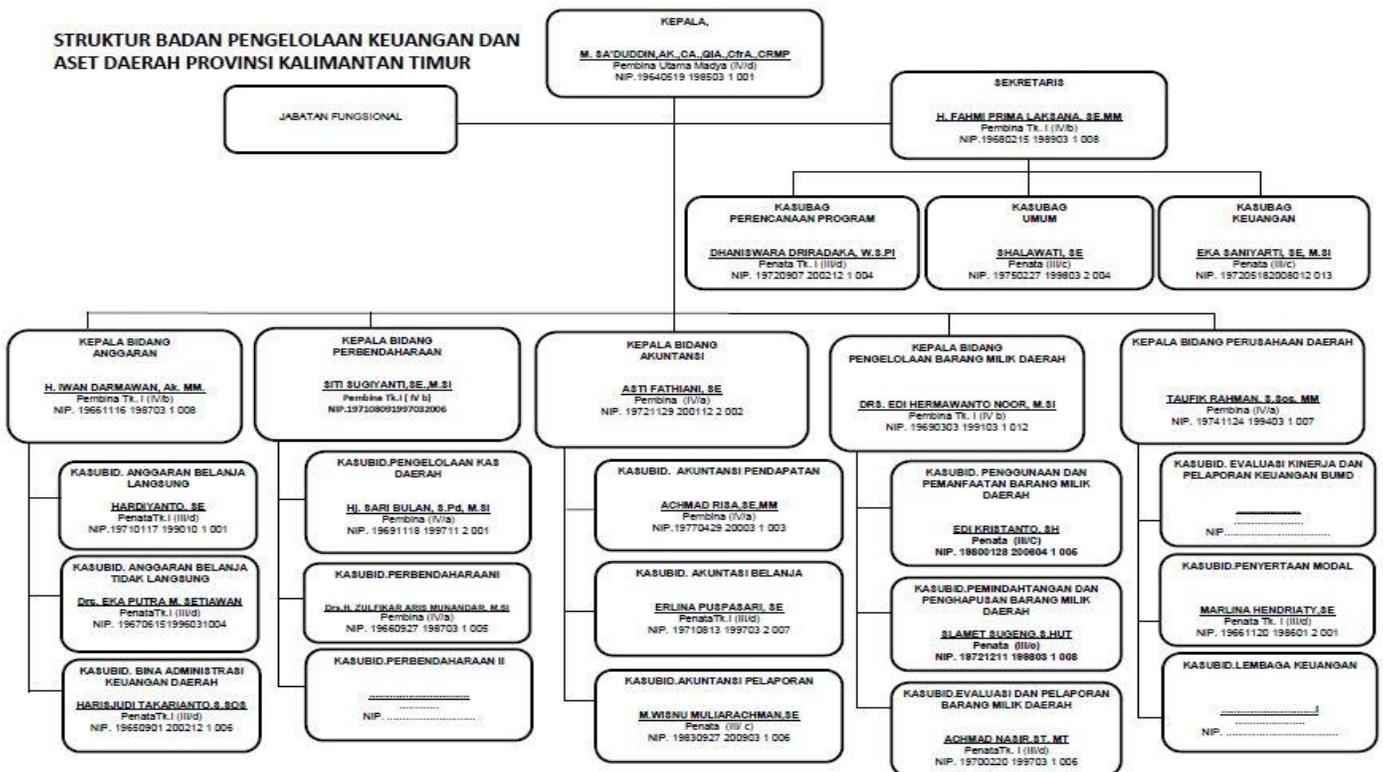
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan pelaporan bidang anggaran;
- h. Pelaksanaan administrasi BPKAD sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPKAD PROVINSI KALTIM

Struktur organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar 1

Gambar.1





D. SUMBER DAYA MANUSIA.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

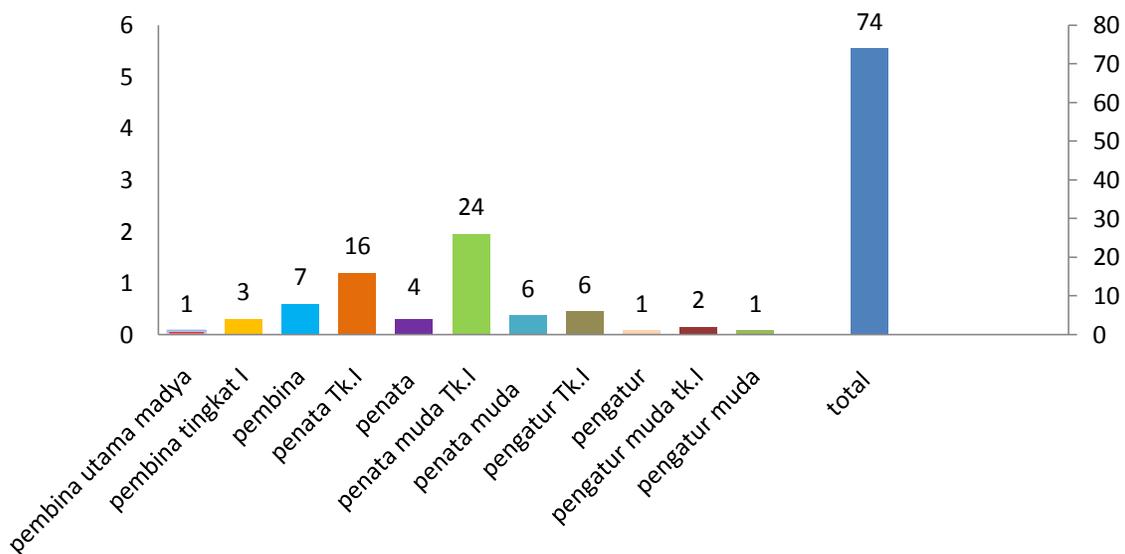
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan sebagai berikut :

Tabel.1.1

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	4
3.	Pembina	IV/ a	8
4.	Penata Tk. I	III/d	16
5.	Penata	III/c	4
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	26
7.	Penata Muda	III/a	5
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	6
9.	Pengatur	II/c	1
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
11.	Pengatur Muda	II/a	1
	TOTAL		74



Gambar.2 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan



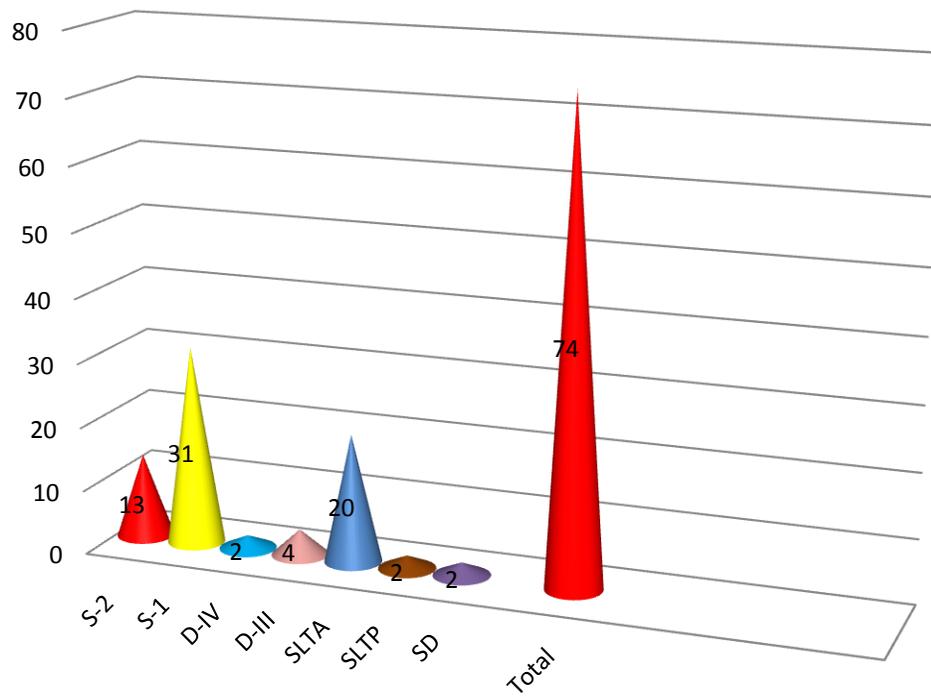
Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2020

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.2

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	13
2.	S-1	31
3.	D-IV	2
4.	D-III	4
5.	SLTA	20
6.	SLTP	2
7.	SD	2
	TOTAL	74

Gambar.3.Grafik Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2020

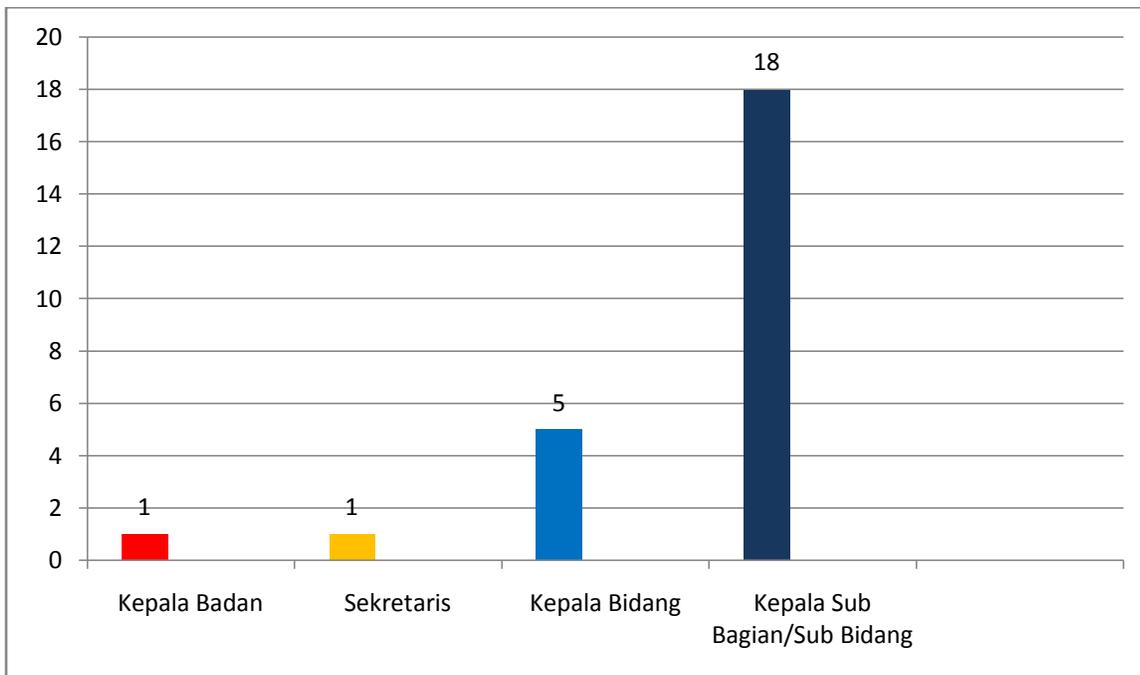


3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 1.3

NO.	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Badan	JPT	1
2.	Sekretaris	Administrator	1
3.	Kepala Bidang	Administrator	5
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	Pengawas	18
	TOTAL		25

Gambar.4 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2020

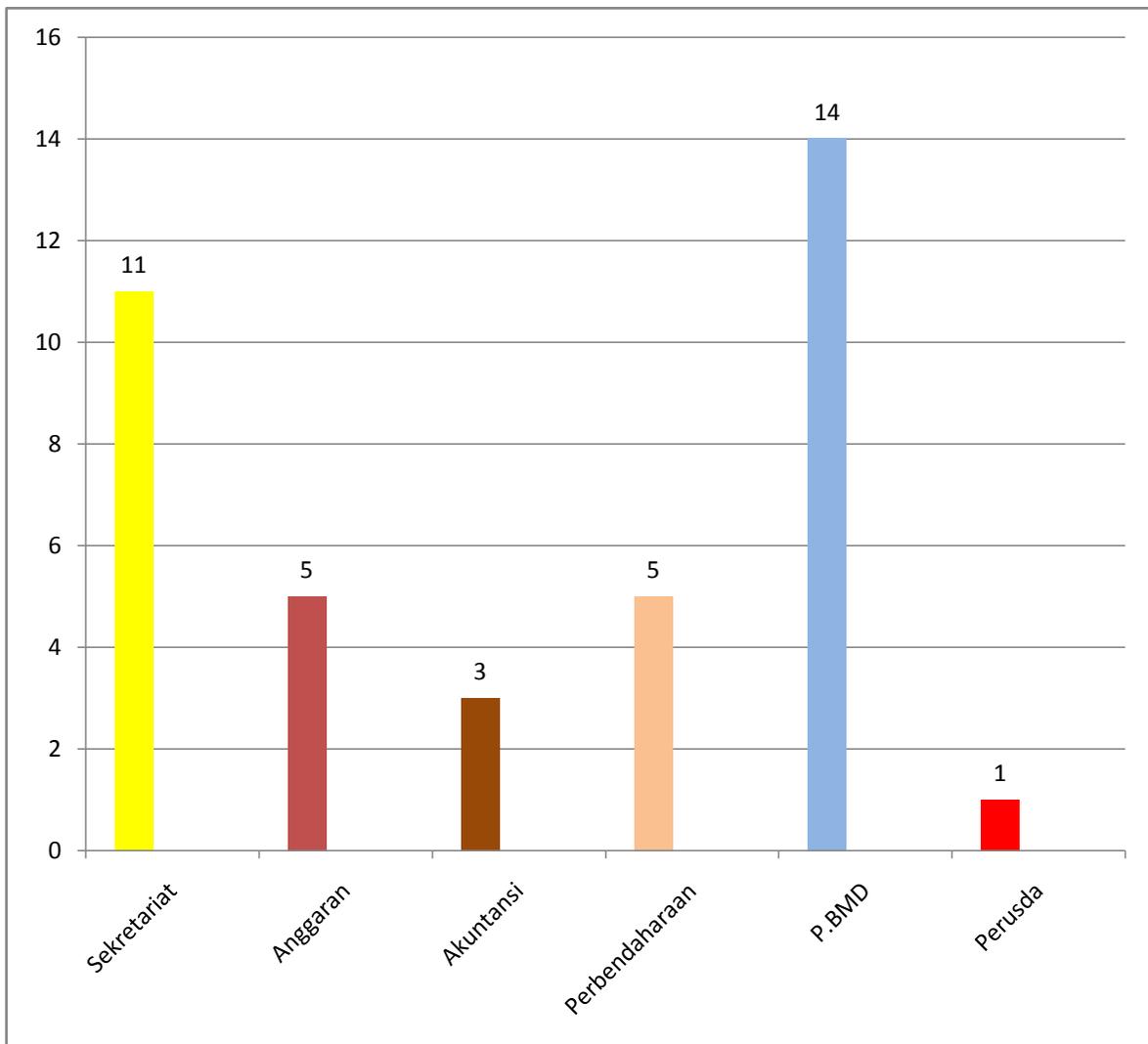


4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

Tabel 1.4

NO.	SEKRETARIAT/BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	11
2.	Bidang Anggaran	5
3.	Bidang Perbendaharaan	3
4.	Bidang Akuntansi	5
5.	Bidang Pengelolaan BMD	14
6.	Bidang Perusahaan Daerah	1
	TOTAL	39

Gambar.5.Grafik Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara



Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2020



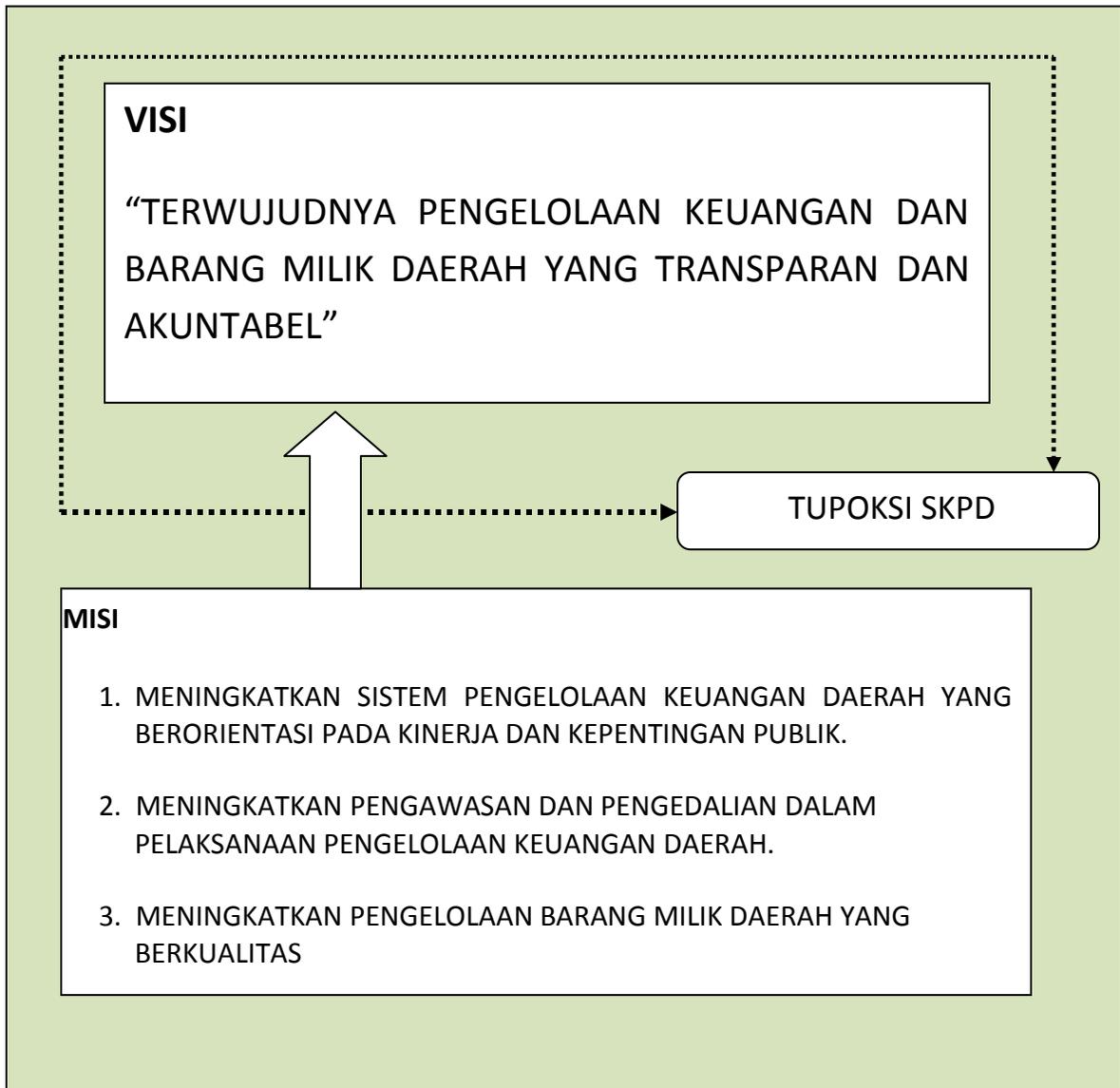
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Visi adalah suatu gambaran untuk menentukan keadaan masa depan dengan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur seluruh Stakeholder Pembangunan. Untuk itu Visi dan Misi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel”** dan Visi ini kemudian dijabarkan kedalam Misi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kinerja Dan Kepentingan Publik.
2. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat terlihat dalam gambar berikut :





F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau menjadi tolak ukur (bench mark) dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi (permasalahan) yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan berpengaruh negatif peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Adanya revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyesuaian urusan dan kewenangan. Semula terdapat urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sekarang berpindah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat dan sebaliknya.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual, dan telah dibahas Peraturan Gubernur Kaltim Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.
3. Telah terbit Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan dimuktahirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat dan juga perubahan/kesesuaian sistem aplikasi dalam pengelolaan/penatausahaan keuangan daerah pada akhir/ tahun anggaran berjalan sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan keuangan daerah.
5. Realisasi anggaran penyelesaian sertifikasi aset tanah sangat dipengaruhi pihak eksternal.



G. SARANA DAN PRASARANA KERJA.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki sarana gedung kantor sendiri dan masih bergabung dengan gedung kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk sarana penunjang kinerja lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.5

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1.	Tanah	1.248.219	M2	
2.	Bangunan yang terdiri :			Lantai 5
	a. Ruang Kerja	11	Unit	Kantor Gubernur Provinsi Kaltim
	b. Ruang Rapat	3	Unit	
	c. Ruang Server	2	Unit	
	d. Mushola	2	Unit	
	e. Gudang	2	Unit	
	f. Internet	6	Jaringan	
3.	Listrik	3	Jaringan	
4.	Air	3	Jaringan	
5.	Telpon	-	Jaringan	
6.	Kendaraan yang terdiri :			
	a. Kendaraan Roda 2	48		10=Baik 24 =Kurang baik 14 =Rusak berat
	b. Kendaraan Roda 4	25		9 = Baik 11=kurang baik 5 =Rusak Berat ➤ Pengurangan Mutasi ke Balitbangda 1 Unit ➤ Penambahan Kendaraan jabatan Kepala Badan 1 Unit

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Dari visi dan misi tersebut, selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan arah kebijakan terhadap pelaksanaan dan target program/kegiatan yang dilaksanakan :

1. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah.
3. Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel

Adapun Sasaran yang hendak dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Terwujudnya Tata Kelola BMD Yang Berkualitas.

Terhadap Sasaran diatas ditetapkan Indikator Sasaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur :

1. Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Ketepatan Waktu Evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur.
3. Ketepatan Waktu Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
4. Prosentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



5. Ketepatan Waktu Penerbitan SPD dan SP2D.
6. Ketepatan Pengelolaan Kas Daerah.
7. Ketepatan Pengelolaan BMD
8. Prosentase Laporan BMD Perangkat Daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu Dokumen Perjanjian Kinerja/ Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.

Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen yang terkait dengan Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) dan merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan adanya Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP). Penetapan Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Target Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 akan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran.



1. Guna mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Sasaran, IKU dan Target Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN S/D TAHUN 2020	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparans Dan Akuntabel	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan perubahan APBD Prov.Kaltim	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Tepat Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Ketepatan Waktu Evaluasi rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD Kab Kota seKaltim		Tepat – Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Ketepatan Waktu penyusunan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.		Tepat Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Prosentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP		Prosentase	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketepatan waktu penerbitan SPD dan SP2D		Prosentase	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketepatan pengelolaan kas daerah		Prosentase	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Transparans Dan Akuntabel	Ketepatan pengelolaan BMD.	Terwujudnya pengelolaan BMD Yang Berkualitas	Prosentase	Persen	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Prosentase Laporan BMD Perangkat Daerah		Prosentase	Persen	80%	80%	80%	80%	80%	80%



2. Program/Kegiatan dalam rangka mencapai Tujuan/Sasaran

Tabel.2.2

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparans Dan Akuntabel	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Tepat Waktu	Waktu	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (tentang APBD).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD. ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD. ▪ Impementasi SIMDA Keuangan Pada Pemerintah Prov.Kaltim. ▪ Penyusunan Analisa Standar Belanja. ▪ Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ▪ Pengelolaan Pengadministrasian Usulan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. ▪ Rekonsiliasi Keuangan Daerah



						<ul style="list-style-type: none">▪ Pengelolaan Belanja Hibah Bantuan Sosial Dan Penyertaan Modal.▪ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.▪ Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah.▪ Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan.▪ Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota.▪ Peningkatan Manajemen aset/barang daerah▪ Pengelolaan sistem informasi pengelolaan BMD▪ Penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD.▪ Monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD.▪ Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.▪ Penyediaan peralatan dan
--	--	--	--	--	--	--



					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran. ▪ Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Pemerintah Daerah 	<p>kelengkapan sarana dan prasarana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana. ▪ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota. ▪ Evaluasi Rancangan Perda KDh Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota. ▪ Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota. ▪ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah KDh Tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota.



						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi.
2	Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Transparans Dan Akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	Prosentase	Prosentase	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pensertifikatan Dan Pengamanan Aset Daerah. ▪ Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan. ▪ Penghapusan Penilaian Dan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah



3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023

Tabel.2.3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur	Tepat waktu atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan. Sesuai dengan permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.	Bukti Penyampaian	Kabid Anggaran
		Ketepatan waktu evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Kab/Kota Se-kaltim	Tepat waktu atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan. Sesuai dengan permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.	Bukti Penyampaian	Kabid Anggaran
		Ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tepat waktu atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan. Sesuai dengan permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.	Bukti Penyampaian	Kabid Akuntansi
		Prosentase laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah laporan keuangan SKPD tepat waktu dengan SAP $\times 100\%$ Jumlah laporan keuangan SKPD dilingkungan Pemprov.Kaltim	Laporan keuangan SKPD Provinsi Kaltim	Kabid Akuntansi
		Ketepatan Waktu penerbitan SPD dan SP2D	Jumlah SP2D yang tepat waktu $\frac{\text{Jumlah SP2D}}{\text{Jumlah SP2D}} \times 100\%$	SPD dan SP2D	Kabid Perbendaharaan
		Ketepatan pengelolaan Kas daerah	Tepat waktu atau tidak tepat pengelolaan kas daerah	laporan	Kabid Perbendaharaan
2.	Terwujudnya pengelolaan BMD Yang Berkualitas	Ketepatan Pengelolaan BMD	Tepat waktu atau tidak tepat pengelolaan BMD	Laporan	Kabid Pengelolaan BMD
		Prosentase laporan BMD Perangkat Daerah	Jumlah PD yg Lap.BMD sesuai dengan SAP dan Peraturan $\times 100\%$ Jumlah PD Prov.Kaltim	Laporan	Kabid Pengelolaan BMD



C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tabel.2.4

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1.	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Provinsi Kaltim	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Bidang Anggaran
		2.	Ketepatan waktu evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Kab/Kota Se-kaltim	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Bidang Anggaran
		3.	Ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Bidang Akuntansi
		4.	Prosentase laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Prosentase	100%	Bidang Akuntansi
		5.	Ketepatan Waktu Penerbitan SPD dan SP2D	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Bidang Perbendaharaan
		6.	Ketepatan Pengelolaan Kas Daerah	Prosentase	100%	Bidang Perbendaharaan
2.	Terwujudnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	1.	Ketepatan Pengelolaan BMD	Prosentase	80%	Bidang P.BMD
		2.	Prosentase Laporan BMD Perangkat Daerah	Prosentase	80%	Bidang P.BMD



Realisasi Target Program/Kegiatan dan Anggaran Belanja Langsung
Tabel 2.5

KODE	URAIAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI			SISA ANGGARAN
				KINERJA	KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.04.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		80%				
4.04.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	6.776.435.242,50	15 Dokumen	15 Dokumen	6.113.139.364,00	90,21	663.295.878,50
4.04.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		80%				
4.04.02.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	2.945.758.745,00	27 unit	27 unit	1.807.296.400,00	61,35	1.138.462.345,00
4.04.02.01.08.02	Pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	479.700.000,00	38 unit	38 unit	362.228.343,00	75,51	117.471.657,00
4.04.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah		80%				
4.04.02.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.914.547.860,00	105 orang	105 orang	1.622.909.462,83	84,77	291.638.397,17
4.04.02.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	718.800.000,00	105 orang	105 orang	444.950.400,00	62,60	265.849.000,00
4.04.02.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		80%				
4.04.02.01.17.42	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	980.000.000,-	6 Dokumen	6 Dokumen	478.077.980,00	48,78	501.922.000,00
4.04.02.01.17.43	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD	576.695.000,-	50 Dokumen	50 Dokumen	159.113.399,00	27,59	417.581.600,00
4.04.02.01.17.46	Monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD	924.848.750	12 Dokumen	12 Dokumen	347.418.228,00	37,56	577.430.522,00
4.04.02.01.17.47	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	770.000.000,00	2 Dokumen	2 Dokumen	714.891.643,00	92,84	55.108.357,00
4.04.02.01.17.01	Penyusunan analisa standar belanja	289.300.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen	289.300.000,00	13,00	251.685.019,00
4.04.02.01.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	2.59.850.000,00	2 Dokumen	2 Dokumen	2.595.850.000,00	89,74	266.376.017,00



1	2	3	4	5	6	7	8
4.04.02.01.17.07	Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Peraturan KDH Penjabaran APBD	1.392.308.000,00	2 Pergub	2 Pergub	1.392.308.000,00	77,86	308.304.293,00
4.04.02.01.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan	579.266.000,00	6 Dokumen	6 Dokumen	284.183.000,00	49,06	295.082.910,00
4.04.02.01.17.11	Penyusunan rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	656.800.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen	300.532.550,00	45,76	356.267.450,00
4.04.02.01.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	630.500.000,00	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	630.500.000,00
4.04.02.01.17.20	Implementasi SIMDA keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	803.000.000,00	3 Dokumen	3 Dokumen	721.100.000,00	69,80	81.900.000,00
4.04.02.01.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	835.000.000,00	12 Dokumen	12 Dokumen	564.717.400,00	67,63	270.282.600,00
4.04.02.01.17.26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan dan Penyertaan Modal	801.600.000,00	500 Dokumen	500 Dokumen	566.087.838,00	70,42	235.512.162,00
4.04.02.01.17.26	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.207.275.000,00	12 Dokumen	12 Dokumen	654.050.205	54,18	553.224.795,00
4.04.02.01.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan penetapan Pejabat Pengelola keuangan Daerah	270.000.000,-	282 Dokumen	282 Dokumen	119.680.000,00	43,86	151.920.000,00
4.04.02.01.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan dan Kas Daerah	1.031.600.000,00	10.000 Berkas	10.000 Berkas	887.507.700,-	86,03	144.092.300,00
4.04.02.01.17.37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan	2.584.737.500,00	10.000 Berkas	10.000 Berkas	2.156.349.295,-	83,43	428.388.205,00
4.04.02.01.17.39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	1.299.300.000,00	12 Dokumen	12 Dokumen	862.763.04,00	66,40	436.536.796,00
4.04.02.01.18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota						
4.04.02.01.18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kab/Kota	332.500.000,00	20 Dokumen	20 Dokumen	122.276.100,00	36,77	210.223.900,00
4.04.02.01.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/kota	299.500.000,00	20 Dokumen	20 Dokumen	98.276.500,00	37,81	201.223.500,00
4.04.02.01.18.07	Evaluasi rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/kota	127.500.000,00	10 Dokumen	10 Dokumen	61.235.000,00	48,03	66.265.000,00
4.04.02.01.18.08	Evaluasi rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban	132.500.000,00	10 Dokumen	10 Dokumen	53.390.000,00	40,29	79.110.000,00



1	2	3	4	5	6	7	8
	pelaksanaan APBD Kab/kota						
4.04.02.01.18.09	Pembinaan dan Fasilitas APBD Kab/Kota	440.250.000,00	10 Dokumen	10 Dokumen	93.016.440,00	21,13	347.233.560,00
4.04.02.01.18.11	Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi	554.187.500,00	12 Dokumen	12 Dokumen	408.786.0101,00	73,76	145.401.490,00
4.04.02.02.01.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah						
4.04.02.02.01.22.01	Pensertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah	3.345.750.000,00	20 Dokumen	16 Dokumen	2.109.091.703,10	63,04	1.235.658.296,00
4.04.02.02.01.22.04	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	917.427.800,00	1 Dokumen	1 Dokumen	843.384.911,00	91,93	74.042.889,00
4.04.02.02.01.22.04	Penghapusan, Penilaian dan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	1.312.175.000,00	5 dokumen	5 dokumen	649.803.285,00	49,52	662.371.715,00
	JUMLAH	41.812.602.397,00			29.326.974.302,03	70,14	12.485.628.09547



1. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni belanja langsung sebesar Rp.43.408.904.180,- dan Racionalisasi Pandemi Covid-19 anggaran APBD 2020 menjadi Rp 41.812.602.397,50,-, dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. 20.045.947.200,00
- Belanja Barang/Jasa Rp. 17.049.928.447,50
- Belanja Modal Rp. 4.716.726.750,00.

2. Target belanja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Tabel 2.5

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020		
		ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
1.	Belanja Tidak Langsung	15.305.569.000,00	10.580.273.130,44	69,12
2.	Belanja Langsung	41.812.602.397,50	29.326.974.302,30	70,14
	JUMLAH	57.118.171.397,50	39.907.247.432,74	69,86

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian Sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

NO.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas	36.237.249.597,50,-	86,66	APBD
2.	Terwujudnya Penelolan BMD Yang Berkualitas	5.575.352.800,-	13,33	APBD
	JUMLAH	41.812.602.397,50,-		



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah Proses Sistematis Dan Berkesinambungan untuk Menilai Keberhasilan Dan Kegagalan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Program, Kebijakan, Sasaran Dan Tujuan Yang Telah Ditetapkan Dalam Mewujudkan Visi, Misi Dan Strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan jelas, Penetapan Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 serta mendasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya pada Sub Bab ini Disajikan :

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Terlampir Ikhtisar Hasil Sementara Evaluasi Implementasi SAKIP Pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur).

Tabel 3.1

NO.	SASARAN STRATEGIS	BOBOT	2018	2019	2020	Turun/ Naik
1	2	3	4	5		
1.	Perencanaan Program	30%	20,57	20,64	0	0
2.	Pengukuran Kinerja	25%	13,44	14,38	0	0
3.	Pelaporan Kinerja	15%	6,3	7,73	0	0
4.	Evaluasi Kinerja	10%	3,25	3,25	0	0
5.	Capaian Kinerja	20%	12,75	8,13	0	0
	Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja	100%	56,31	54,12	0	0
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC		

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP.

Tabel 3.2

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kerja, Tim Inspektorat belum melakukan review untuk LKjIP tahun 2020	-	-



B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

Tabel 3.3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	TRIWULAN	TARGET	TOTAL REALISASI PERTRIWULAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Program pelayanan administrasi perkantoran	Tw I	80%	863.759.530,00	12,54
						Tw II		2.401.521.018,00	38,00
						Tw III		3.857.007.187,00	61,03
						Tw IV		6.113.139.364,00	90,21
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tw I	80%	24.827.053,00	1,41
						Tw II		75.891.505,00	9,79
						Tw III		145.369.572,00	18,75
						Tw IV		2.169.524.743,00	63,34
					Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah	Tw I	80%	606.297.566,00	11,85
						Tw II		731.614.846,00	29,10
						Tw III		799.400.564,00	31,79
						Tw IV		2.067.859.862,83	78,77
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas	- Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Prov.Kaltim			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tw.I	Tepat waktu	1.558.466.742,00	7,13
		- Ketepatan Waktu Evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Kab/Kota				Tw II		4.267.206.660,00	25,62
		-Ketepatan Waktu Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD				Tw III		6.277.814.035,00	37,69
		-Prosentase Laporan keuangan SKPD sesuai				Tw IV		14.537.190.383,00	67,54



		Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)							
		Ketepatan Waktu Penerbitan SPD dan SP2D							
		Ketepatan Pengelolaan Kas Daerah							
					Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan daerah				
						Tw I	100%	78.190.100,00	3,96
						Tw II		105.981.440,00	6,80
						Tw III		305.685.950,00	19,61
						Tw IV		836.980.050,00	44,37
2.	Terwujudnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	-Ketepatan Pengelolaan BMD		Prosentase	Program peningkatan sarana dan prasarana daerah				
						Tw I	80%	152.043.796,00	2,62
		-Prosentase Laporan BMD PD Sesuai SAP							
						Tw II		627.602.296,00	19,34
						Tw III		1.133.017.176,00	34,92
						Tw IV		3.602.279.899,10	63,48



C. Analisa Capaian Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 :

Tabel 3.4

NO.	SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas	Tepat Waktu	36.237.249.597,50	25.724.694.402,93	70,98
2.	Terwujudnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	Prosentase	5.575.352.800,-	3.602.279.899,10	64,61
	Jumlah		41.812.602.397,50	29.326.974.302,03	70,14

2. Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 3.5

No.	Sasaran Strategis	Satuan	Realisasi		Turun/Naik
			2019	2020	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas	Tepat Waktu	26.363.220.048,01	25.724.694.402,93	Turun
2.	Terwujudnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	Prosentase	14.096.624.623,65	3.602.279.899,10	Turun



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.6

No.	Sasaran Strategis	Sat	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas	Tepat Waktu	36.237.249.597,50	25.724.694.402,93	70,98
2.	Terwujudnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	Prosentase	5.575.352.800,-	3.602.279.899,10	64,61
			41.812.602.397,50	29.326.974.302,03	70,14



4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman SDM dalam proses penyusunan penganggaran.
- b. Adanya efisiensi anggaran pada beberapa pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya perbedaan persepsi regulasi dalam proses Pensertifikatan aset tetap/tanah.
- d. Pandemi Covid-19 mengakibatkan kinerja kurang maksimal karena sistem kerja ASN/Non ASN harus disesuaikan untuk beradaptasi terhadap kondisi pandemi dengan mengikuti protokol kesehatan antara lain membuat pola kerja Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas antara lain :

- a. Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja.
- b. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik.
- c. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan para stakeholder (horizontal maupun instansi vertikal).
- d. Bekerja dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada antara lain melaksanakan pekerjaan melalui daring/sistem online bagi pegawai yang berstatus WFH dan offline bagi pegawai yang berstatus WFO..

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Pembaharuan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.
- d. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait/stakeholder.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7

No.	Sasaran Strategis	Output Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Rasio efisiensi
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas	70,98	70,98	100% (efisien berimbang)
2.	Terwujudnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	80,76	64,61	124% (efisien)



Tabel Realisasi anggaran dari tahun 2017 s.d tahun 2020

Tabel 3.8

Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi	Total APBD		Jumlah Program yang dialokasikan		Total Program/kegiatan		ket
			Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017	36.308.208.000,-	30.940.386.737,-	14.089.408.000,-	21.514.400.000,-	6	32	6	32	-
2018	45.825.934.193,-	36.924.345.478,79	31.274.912.194,-	13.675.022.000,-	6	31	6	31	-
2019	65.367,596.501,-	51.438.018.470,66	52.719.598.501,-	12.647.998.000,-	6	34	6	34	-
2020	57.118.171.397,50	39.907.247.432,74	41.812.602.397,50	15.305.569.000,-	6	33	6	34	-

D Realisasi Anggaran

1.Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.9

No.	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas	100%	70,98	70,98	36.237.249.597,50	25.724.694.403,93	70,98
2.	Terwujudnya Pengelolaan BMD yang Berkualitas	80%	80,76	80,76	5.575.352.800,-	3.602.279.899,10	64,62
	TOTAL				41.812.602.397,50	29.326.974.302,03	70,14



2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan :

Tabel 3.10

No.	Program/Kegiatan	anggaran			Ket
		Target	Realisasi	% capaian	
1.	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.776.435.242,50	6.113.139.364,00	90,21	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.425.458.745,00	2.169.524.743,00	63,34	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.625.347.860,00	2.067.859.862,83	78,77	
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	21.523.570.250,00	14.537.190.383,10	67,54	
5.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	1.886.437.500,00	836.980.050,00	44,37	
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	5.575.352.000,00	3.602.279.899,10	64,61	
	Jumlah	41.812.602.397,50	29.326.974.302,03	70,14	



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Perangkat Daerah (PD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

B. Rencana Tindak Lanjut

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana yang telah ditargetkan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.



Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2020 akan dievaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah ke depan.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

M.Sa'duddin,Ak.,CA.,QIA.,CFrA.,CRMP
Pembina Utama Madya
NIP.19640519 198503 1 001